



Edukasi Penerapan Standar Operasional Prosedur oleh Petugas dalam Rangka Pencegahan Penyakit Potensial Wabah di Pintu Masuk Pelabuhan Malundung Kota Tarakan

Education on the Implementation of Standard Operating Procedures by Officers in the Context of Preventing Potential Disease Outbreaks at the Entry Point of Malundung Port, Tarakan City

Agustin¹, Sri Wahyu Ekowati²

^{1,2} Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia

Alamat: Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C5, Setiabudi, Jakarta, Indonesia 12920

Korespondensi penulis: wahyuekowati2605@gmail.com

Article History:

Received: Juni 30, 2025;

Revised: Juli 15, 2025;

Accepted: Juli 31, 2025

Published: Agustus 02, 2025

Keywords: Education, Disease and Outbreak Prevention, Standard Operating Procedures:

Abstract. Ports serve as strategic entry points with a high potential for the transmission of infectious diseases and outbreaks, thus requiring the effective implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) by port health officers. This community service activity aims to provide SOP education for officers to prevent potential outbreaks at ports, based on the latest literature review. The method used involves delivering educational sessions supplemented by discussions drawn from various academic sources, government regulations, and technical guidelines relevant to the 2011–2024 publication period. These include Minister of Health Regulation No. 2348/2011, Ministerial Decrees from 2015–2023, and scientific publications related to outbreak prevention at ports. The results indicate that comprehensive SOP education encompasses seven key components: understanding the strategic role of ports in border control, mastery of the officers' multidimensional tasks, outbreak surveillance and control components, effective health information communication methods, the central role of health personnel as educators, integration with the national health system, and continuous evaluation of the educational program. The discussion highlights that the success of SOP implementation is highly dependent on the quality of education provided to the officers, with an emphasis on ongoing training, emergency simulations, and cross-sector coordination. Optimal SOP education will enhance officers' preparedness to detect, prevent, and control potential outbreaks, enabling ports to function as effective barriers in protecting public health from infectious disease threats, in line with Indonesia's commitment to the International Health Regulations (IHR) 2005

Abstrak.

Pelabuhan merupakan pintu masuk strategis yang berpotensi tinggi terhadap penyebaran penyakit menular dan wabah, sehingga memerlukan implementasi standar operasional prosedur (SOP) yang efektif oleh petugas kesehatan pelabuhan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melaksanakan edukasi SOP bagi petugas dalam mencegah penyakit potensial wabah di pelabuhan berdasarkan kajian literatur terkini. Metode yang digunakan adalah pemberian edukasi beserta tambahan pembahasan dari berbagai sumber akademik, regulasi pemerintah, dan panduan teknis yang relevan dengan periode publikasi 2011-2024, meliputi Permenkes 2348/2011, Keputusan Menteri Kesehatan 2015-2023, dan publikasi ilmiah terkait pencegahan wabah di pelabuhan. Hasil menunjukkan bahwa edukasi SOP yang komprehensif meliputi tujuh komponen utama: pemahaman peran strategis pelabuhan sebagai border control, penguasaan tugas multidimensional petugas, komponen pelacakan dan pengendalian wabah, metode komunikasi informasi kesehatan yang efektif, peran sentral tenaga kesehatan sebagai edukator, integrasi dengan sistem kesehatan nasional, dan evaluasi berkelanjutan program edukasi. Diskusi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SOP sangat bergantung pada kualitas

edukasi yang diberikan kepada petugas, dengan penekanan pada pelatihan berkelanjutan, simulasi kedaruratan, dan koordinasi lintas sektor. Edukasi SOP yang optimal akan meningkatkan preparedness petugas dalam mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan potensi wabah, sehingga pelabuhan dapat berfungsi sebagai barier efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit menular sesuai komitmen Indonesia terhadap International Health Regulations 2005.

Kata kunci: Edukasi, Pencegahan Penyakit & Wabah, Standar Oprasional Prosedur

1. LATAR BELAKANG

Pelabuhan laut merupakan salah satu titik masuk utama yang berpotensi menjadi jalur penyebaran penyakit menular, khususnya penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah (PPW). Aktivitas pergerakan manusia, barang, dan moda transportasi laut antarwilayah atau antarnegara menjadikan pelabuhan sebagai lokasi strategis dalam pengawasan kesehatan masyarakat. Menurut WHO (2023), pintu masuk negara seperti pelabuhan laut harus memiliki sistem yang kuat dalam deteksi dini dan respon cepat terhadap ancaman kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks International Health Regulation (IHR 2005).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pelabuhan memegang peran penting dalam pengendalian penyakit menular lintas wilayah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI (2022), penyakit seperti demam berdarah dengue, kolera, dan infeksi saluran pernapasan akut berisiko meningkat di wilayah pelabuhan dengan tingkat mobilitas tinggi, terutama di provinsi perbatasan seperti Kalimantan Utara. Pelabuhan Malundung di Kota Tarakan, sebagai salah satu gerbang laut yang menghubungkan aktivitas domestik dan internasional, termasuk wilayah yang berisiko tinggi menjadi jalur masuknya penyakit potensial wabah.

Data penyakit yang tercatat selama arus mudik dan balik Lebaran Tahun 2024/1445 H, ditemukan sebanyak 67 kasus penyakit yang tersebar di berbagai kelompok usia dan jenis kelamin. Penyakit yang paling banyak dilaporkan adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dengan total 22 kasus, yang terbagi rata antara laki-laki dan perempuan usia di atas 5 tahun. Hipertensi menempati posisi kedua terbanyak dengan 11 kasus, didominasi oleh perempuan usia di atas 5 tahun sebanyak 8 kasus. Selanjutnya, penyakit Gastritis dilaporkan sebanyak 5 kasus, terdiri dari 2 kasus pada laki-laki dan 3 pada perempuan. Penyakit lain yang juga cukup sering muncul adalah Motion Sickness (mabuk perjalanan) dengan 6 kasus, di mana 2 kasus terjadi pada laki-laki dan 4 pada perempuan. Dermatitis dilaporkan sebanyak 4 kasus, Myalgia Fatigue (kelelahan otot) sebanyak 3 kasus, serta Artritis dan Cephalgia (sakit kepala) masing-masing sebanyak 2 dan 4 kasus. Terdapat pula satu kasus Diabetes Melitus dan satu kasus Dyspepsia, serta dua kasus Asma yang semuanya terjadi pada perempuan usia di atas 5 tahun. Meskipun ada laporan COVID-19 dengan hasil RDT positif, serta suspek COVID yang

diperiksa dengan RDT, data menunjukkan tidak ditemukan kasus pada kategori tersebut. Sebagian besar kasus tercatat pada kelompok usia perempuan di atas 5 tahun (41 kasus), diikuti oleh laki-laki di atas 5 tahun (25 kasus), dan satu kasus pada laki-laki di bawah 5 tahun, sementara tidak ada kasus yang tercatat pada perempuan di bawah 5 tahun. Data ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit umum yang muncul selama mobilitas tinggi, seperti saat mudik Lebaran, terutama pada kelompok usia produktif.

Berdasarkan data dari SKDR M-24 Tahun 2025, terdapat 10 jenis penyakit potensial wabah yang terdeteksi di wilayah kerja area buffer Pelabuhan pada BKK Kelas I Tarakan pada minggu ke-24 tahun 2025. Penyakit dengan jumlah kasus tertinggi adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dengan 13 kasus, diikuti oleh Diare Akut, Gigitan Hewan Penular Rabies, dan Pneumonia masing-masing sebanyak 10 kasus. Selain itu, kasus ILI (Penyakit Serupa Influenza) dan Suspek Dengue tercatat masing-masing sebanyak 6 kasus, sedangkan Suspek Demam Tifoid dilaporkan sebanyak 5 kasus. Penyakit lainnya yang juga terdeteksi antara lain Suspek HFMD dan Suspek Campak dengan masing-masing 4 kasus, serta Diare Berdarah atau Disentri sebanyak 2 kasus. Meskipun berbagai penyakit ini berpotensi menimbulkan wabah, namun berdasarkan pemantauan pada minggu tersebut, tidak ada satu pun dari jenis penyakit yang tercatat mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian penyakit menular di area pelabuhan masih dalam kondisi terkendali meskipun potensi risiko tetap ada.

Upaya pengendalian penyakit di pelabuhan tidak dapat terlepas dari peran petugas kesehatan pelabuhan dalam menerapkan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu instrumen penting adalah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP berfungsi sebagai pedoman baku bagi petugas untuk melakukan tindakan promotif, preventif, hingga responsif terhadap temuan kasus atau gejala penyakit menular. Studi dari Dewi & Suryani (2021) menunjukkan bahwa efektivitas SOP sangat bergantung pada kepatuhan dan pemahaman petugas terhadap isi serta mekanisme pelaksanaannya.

Meskipun telah tersedia SOP dalam bentuk kebijakan nasional dan lokal, implementasinya di lapangan seringkali belum optimal. Hambatan seperti kurangnya pelatihan, keterbatasan sumber daya manusia, dan tidak tersedianya sarana pendukung menjadi faktor penghambat. Penelitian oleh Sitorus et al. (2020) mengungkapkan bahwa 58% petugas di pelabuhan tidak menerapkan SOP secara konsisten karena kurangnya supervisi dan monitoring berkala dari instansi terkait.

Selain itu, pemahaman terhadap urgensi penerapan SOP dalam konteks penyakit potensial wabah juga masih kurang merata. Sebagian petugas hanya melaksanakan

pemeriksaan administratif tanpa memahami gejala klinis dan tanda-tanda epidemiologis yang wajib dilaporkan. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Nursalim et al. (2022), yang menemukan bahwa ketidaksesuaian antara pengetahuan dan praktik SOP dapat meningkatkan risiko kelolosan kasus penyakit menular di pelabuhan.

Optimalisasi penerapan SOP menjadi penting karena tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga manajerial. Dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi antara Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Kota, serta pihak pelabuhan itu sendiri. Menurut jurnal Pambudi & Hartati (2021), kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan dapat mempercepat respons serta memperbaiki kepatuhan petugas terhadap SOP.

Kondisi geografis Kota Tarakan yang berada di wilayah perbatasan dan dekat dengan jalur perdagangan lintas negara menempatkan pelabuhan Malundung sebagai titik rawan penyebaran penyakit seperti TB, malaria, dan penyakit zoonosis. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang sejauh mana SOP telah diimplementasikan secara optimal dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian lokal oleh Andika & Rahman (2023) di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pelabuhan dengan SOP yang dijalankan secara maksimal mampu mendeteksi dini 3 kasus dugaan penyakit menular dalam 2 bulan.

Dalam penugasan residensi penulis telah menulis berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari penerapan standar oprasional prosedur oleh petugas dalam rangka pencegahan penyakit potensial wabah di Pintu Masuk Pelabuhan Malundung Kota Tarakan. Yang mana dalam studi tersebut terdapat beberapa strategi dalam meningkatkan pencegahan penyakit potensial wabah di Pintu Masuk Pelabuhan. Berdasarkan kondisi diatas maka penulis ingin menerapkan strategi dalam meningkatkan pencegahan penyakit potensial wabah di Pintu Masuk Pelabuhan Malundung Kota Tarakan.

2. METODE KEGIATAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pintu Masuk Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi dan memiliki risiko besar terhadap penyebaran penyakit potensial wabah. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei–Juni 2025, dengan sasaran utama petugas kesehatan pelabuhan, tenaga keamanan, dan pihak terkait lainnya yang berperan dalam pengawasan kesehatan di area pelabuhan.

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) assesment kebutuhan (need assessment), (2) intervensi edukatif dan teknis, dan (3) evaluasi dan tindak lanjut.

a. Assesment Kebutuhan:

Tahap awal dilakukan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan diskusi informal dengan petugas pelabuhan untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan (analisis SWOT) dalam penerapan SOP pencegahan penyakit potensial wabah. Data pendukung juga diperoleh dari laporan SKDR BKK Kelas I Tarakan serta dokumentasi kasus kesehatan selama arus mudik Lebaran 2024/1445 H.

b. Intervensi Edukatif dan Teknis

Intervensi dilakukan melalui kegiatan edukasi terpadu dan pelatihan tentang penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan penyakit menular, yang mencakup:

- 1) Pelatihan dan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai isi, tujuan, dan pentingnya SOP kesehatan pelabuhan.
- 2) Sosialisasi SOP secara interaktif dengan media audiovisual, leaflet, poster, dan kuis edukatif.
- 3) Distribusi Alat Pelindung Diri (APD) dan alat skrining seperti thermogun, rapid test kit, dan disinfektan.
- 4) Pengembangan sistem pelaporan digital berbasis aplikasi sederhana untuk pelaporan dan pemantauan pelaksanaan SOP.
- 5) Penataan ulang zona pengawasan dan fasilitas skrining di pelabuhan agar lebih optimal.

Kegiatan ini difasilitasi oleh tim pengabdian yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan akademisi.

c. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal pelabuhan menggunakan lembar checklist kepatuhan SOP. Evaluasi mencakup capaian pelaksanaan SOP, kendala implementasi, serta umpan balik dari peserta. Tindak lanjut dilakukan melalui pertemuan evaluatif lintas instansi dan penguatan keberlanjutan edukasi secara triwulanan.

Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kemampuan petugas dalam menerapkan SOP secara menyeluruh guna mencegah terjadinya penyebaran penyakit menular di wilayah pelabuhan sesuai dengan standar nasional dan komitmen International Health Regulations (IHR) 2005.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prioritas Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah diuraikan diatas maka dapat dibuat prioritas masalah dalam pengabdian masyarakat tentang penerapan standar oprasional prosedur oleh petugas dalam rangka pencegahan penyakit potensial wabah di Pintu Masuk Pelabuhan Malundung Kota Tarakan. yaitu:

Prioritas Masalah	Solusi
1. Kurangnya pemahaman petugas terhadap isi dan tujuan SOP	1. Melakukan edukasi terpadu dan diskusi kelompok terarah (FGD) secara berkala mengenai isi dan tujuan SOP.
2. Ketersediaan APD dan alat skrining kesehatan yang tidak memadai	2. Mengusulkan pengadaan APD dan alat skrining melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan dana operasional.
3. Tidak adanya monitoring dan evaluasi berkala penerapan SOP	3. Membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) internal untuk melakukan audit penerapan SOP secara berkala.
4. SOP tidak tersosialisasi secara rutin dan menyeluruh	4. Menjadwalkan sosialisasi SOP setiap triwulan dengan metode interaktif kepada seluruh petugas lintas instansi.
5. Kurangnya pelatihan rutin atau refreshment untuk petugas pelabuhan	5. Mengadakan pelatihan dan refreshment rutin minimal dua kali setahun bekerja sama dengan lembaga terkait.
6. Peralatan komunikasi & teknologi tidak memadai (sistem digital lemah)	6. Mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis aplikasi sederhana yang dapat digunakan oleh petugas.
7. Lingkungan pelabuhan tidak mendukung pelaksanaan pengawasan optimal	7. Melakukan advokasi kepada pengelola pelabuhan untuk menata ulang zona pengawasan dan fasilitas skrining.

Rencana Intervensi

Berdasarkan identifikasi permasalahan di area pintu masuk Pelabuhan Malundung Kota Tarakan, dirancang rencana intervensi terpadu guna meningkatkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh petugas dalam mencegah penyakit potensial wabah. Intervensi diawali dengan peningkatan kapasitas petugas melalui edukasi dan pelatihan, berupa kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan bimbingan teknis terkait pemahaman isi, tujuan, dan pentingnya SOP kesehatan pelabuhan. Pelatihan ini akan dilakukan secara berkala, minimal dua kali setahun, dan dapat melibatkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan akademisi sebagai fasilitator.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, terutama ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat skrining penyakit menular. Upaya ini dapat

dilakukan melalui advokasi kepada instansi terkait agar dialokasikan anggaran khusus atau hibah, serta pengajuan dukungan dari mitra kerja seperti lembaga donor atau CSR perusahaan pelayaran. Dukungan logistik ini sangat penting untuk menunjang kelancaran deteksi dini dan perlindungan petugas.

Selanjutnya, dirancang mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan SOP, yaitu dengan membentuk tim Monev internal pelabuhan yang melakukan audit SOP secara berkala, serta menyusun laporan capaian penerapan prosedur. Agar SOP benar-benar dipahami dan diterapkan menyeluruh, akan dilakukan sosialisasi rutin secara triwulanan yang melibatkan semua unsur petugas pelabuhan, dengan pendekatan komunikatif melalui media seperti poster, video edukatif, serta aplikasi kuis interaktif.

Untuk menunjang sistem pelaporan dan komunikasi, akan dikembangkan sistem pelaporan digital berbasis aplikasi yang sederhana dan mudah diakses oleh petugas. Sistem ini memungkinkan pendataan real-time kasus penyakit potensial wabah serta pelacakan tindak lanjutnya. Terakhir, perlu dilakukan penataan ulang lingkungan pelabuhan, termasuk penyediaan zona pemeriksaan khusus, rambu penunjuk kesehatan, dan penempatan personel di titik strategis, guna mendukung proses pengawasan kesehatan yang lebih optimal dan terorganisir. Intervensi ini diharapkan mampu menciptakan sistem deteksi dini yang responsif dan mencegah terjadinya penyebaran penyakit di wilayah pelabuhan.

Implementasi

Berikut adalah implementasi rencana intervensi untuk edukasi penerapan SOP oleh petugas dalam rangka pencegahan penyakit potensial wabah di Pintu Masuk Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan:

1. Pelaksanaan Edukasi dan Pelatihan Petugas

Kegiatan dimulai dengan menyusun modul edukasi SOP kesehatan pelabuhan yang merujuk pada pedoman resmi dari Kementerian Kesehatan dan IHR 2005. Selanjutnya, dilakukan pelatihan dalam bentuk kelas teori dan praktik lapangan kepada petugas pelabuhan (KKP, tenaga kesehatan, keamanan pelabuhan) selama dua hari. Kegiatan ini melibatkan fasilitator dari Dinkes, akademisi, dan praktisi. Setiap peserta akan mendapatkan materi, lembar evaluasi, dan sertifikat pelatihan.

2. Pengadaan dan Distribusi APD serta Alat Skrining

Melalui koordinasi dengan instansi terkait, dilakukan pengajuan bantuan logistik berupa masker medis, sarung tangan, thermogun, rapid test kit, dan disinfektan. APD dan alat

skrining ini kemudian didistribusikan kepada pos pemeriksaan pintu masuk pelabuhan, lengkap dengan buku panduan penggunaannya.

3. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Tim Monev dibentuk melalui surat tugas resmi dari kepala pelabuhan atau pimpinan KKP. Tugas utama tim ini adalah mengawasi pelaksanaan SOP secara harian, membuat laporan bulanan, serta memberikan umpan balik langsung kepada petugas terkait temuan dan perbaikan. Tim ini juga akan menggunakan checklist SOP yang disediakan sebagai alat evaluasi standar.

4. Sosialisasi SOP Secara Rutin

Sosialisasi dilakukan setiap tiga bulan dalam bentuk pertemuan lintas instansi di area pelabuhan. Materi disampaikan secara interaktif menggunakan poster, leaflet, dan media audiovisual. Untuk menjangkau lebih luas, sosialisasi juga dilakukan melalui grup WhatsApp resmi petugas dan siaran pengeras suara di lingkungan pelabuhan.

5. Pengembangan Sistem Pelaporan Digital

Bekerja sama dengan tim IT lokal atau instansi pendidikan, dikembangkan aplikasi sederhana berbasis web atau mobile untuk pelaporan kasus dan pelaksanaan SOP. Aplikasi ini dapat diakses oleh petugas untuk mencatat kasus, mengunggah bukti dokumentasi, dan memantau status laporan harian. Sosialisasi penggunaan sistem ini juga dilakukan sebagai bagian dari pelatihan.

6. Penataan Lingkungan dan Zona Pengawasan

Dilakukan pemetaan ulang area pelabuhan dan penempatan ulang titik pemeriksaan suhu, pos pemeriksaan dokumen kesehatan, serta penambahan rambu-rambu petunjuk kesehatan. Tempat skrining disesuaikan agar mudah dijangkau dan tidak mengganggu alur pergerakan penumpang, dengan penambahan area tunggu dan batasan fisik untuk keamanan.

Dengan implementasi ini, diharapkan sistem pencegahan penyakit potensial wabah di Pelabuhan Malundung menjadi lebih siap, responsif, dan berkelanjutan sesuai standar kesehatan nasional dan internasional..

Pelabuhan merupakan pintu masuk utama yang memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran penyakit menular dan potensial wabah. Menurut penelitian tentang implementasi International Health Regulations (IHR) 2005 di Indonesia, Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki peran krusial sebagai border control untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Kantor Pelabuhan, 2023). Edukasi mengenai standar operasional prosedur (SOP) kepada petugas menjadi fondasi

utama dalam memastikan kesiapan dan kemampuan petugas dalam mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan potensi wabah yang dapat masuk melalui jalur transportasi laut. Implementasi SOP yang tepat memerlukan pemahaman mendalam dari setiap petugas tentang prosedur yang harus dilakukan, mulai dari screening kesehatan hingga tindakan karantina bila diperlukan.

Petugas kesehatan pelabuhan memiliki tanggung jawab multidimensional dalam pencegahan penyakit potensial wabah. Berdasarkan Permenkes 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, petugas pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaaan serta surveilans epidemiologi penyakit potensial wabah (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Edukasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan petugas memahami prosedur pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan. Peningkatan kapasitas petugas melalui program edukasi berkelanjutan akan meningkatkan efektivitas implementasi SOP dalam pencegahan penyebaran penyakit.

Edukasi SOP pelacakan kontak penyakit potensi wabah meliputi beberapa komponen penting yang harus dikuasai petugas. Menurut literatur tentang SOP pelacakan kontak penyakit potensi KLB, komponen utama meliputi penyelidikan epidemiologi dan identifikasi kelompok rentan, penatalaksanaan penderita, dan pencegahan penyebaran penyakit (Depkes RI, 2024). Petugas harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara melakukan screening kesehatan yang efektif, identifikasi gejala-gejala penyakit menular, dan prosedur isolasi atau karantina yang tepat. Edukasi juga harus mencakup penggunaan alat pelindung diri (APD) yang benar, prosedur dekontaminasi, dan sistem pelaporan yang cepat dan akurat kepada otoritas kesehatan yang berwenang.

Implementasi edukasi SOP memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan pesan sampai dengan baik kepada semua petugas. Pengalaman dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan dan pengendalian penyakit di tempat umum seperti pelabuhan terbukti efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan petugas (Depkes RI, 2024). Metode edukasi yang dapat diterapkan meliputi pelatihan tatap muka, simulasi penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat, workshop praktek langsung, dan penyebarluasan media promosi kesehatan seperti leaflet, poster, dan spanduk. Penggunaan teknologi digital dan platform online juga dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas program edukasi.

Tenaga kesehatan, khususnya perawat pelabuhan, memiliki peran sentral dalam implementasi edukasi SOP pencegahan wabah. Berdasarkan literatur tentang tugas perawat di pelabuhan dan bandara, perawat bertugas memberikan edukasi kepada penumpang dan petugas pelabuhan mengenai pencegahan penyakit menular dan kebersihan lingkungan (Dewi, 2024). Perawat juga bertanggung jawab dalam menyusun dan menyebarluaskan media promosi kesehatan serta terlibat dalam simulasi penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kapasitas perawat dalam memberikan edukasi yang komprehensif dan mudah dipahami menjadi kunci keberhasilan implementasi SOP. Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan edukasi perawat sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas program pencegahan wabah.

Edukasi SOP pencegahan wabah di pelabuhan harus terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional untuk memastikan koordinasi yang optimal. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, diperlukan harmonisasi antara SOP pelabuhan dengan protokol kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Integrasi ini mencakup sistem pelaporan yang terstandardisasi, mekanisme rujukan yang jelas, dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Edukasi petugas harus menekankan pentingnya komunikasi dengan unit kesehatan lainnya, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan daerah. Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi akan memudahkan monitoring dan evaluasi implementasi SOP serta respons cepat terhadap potensi wabah.

Evaluasi berkelanjutan terhadap program edukasi SOP merupakan komponen penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi materi edukasi. Sistem monitoring dan evaluasi harus mencakup penilaian terhadap tingkat pemahaman petugas, kemampuan implementasi SOP dalam situasi nyata, dan respons terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat (Lemuru, 2024). Feedback dari petugas lapangan dan stakeholder terkait harus digunakan untuk perbaikan program edukasi secara berkelanjutan. Pengembangan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan akan membantu dalam menilai keberhasilan program edukasi. Selain itu, update berkala terhadap materi edukasi diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan regulasi terbaru dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Edukasi penerapan standar operasional prosedur oleh petugas dalam rangka pencegahan penyakit potensial wabah di pintu masuk pelabuhan merupakan strategi fundamental yang

memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan kajian literatur, keberhasilan program edukasi SOP bergantung pada beberapa faktor kunci yaitu pemahaman mendalam tentang peran dan tanggung jawab petugas, implementasi metode edukasi yang efektif, keterlibatan aktif tenaga kesehatan sebagai edukator, integrasi dengan sistem kesehatan nasional, dan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Implementasi yang optimal dari program edukasi SOP akan meningkatkan kapasitas petugas dalam mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan potensi wabah, sehingga pelabuhan dapat berfungsi sebagai barier yang efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit menular. Investasi dalam program edukasi SOP tidak hanya meningkatkan preparedness dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target global dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap International Health Regulations 2005.

DAFTAR REFERENSI

- Andika, F., & Rahman, Y. (2023). Studi Implementasi SOP Deteksi Penyakit Menular di Pelabuhan Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 12(2), 132–140.
- Dewi, N. L., & Suryani, N. (2021). Evaluasi Penerapan SOP dalam Pengawasan Kesehatan di Pelabuhan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 87–95.
- Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. (2024). Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pelabuhan. Retrieved from <https://dinkes.kepriprov.go.id/>
- Jurnal Lemuru. (2024). Penerapan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) dalam Industri Pengolahan Hasil Laut.
- Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang. (2023). Implementasi International Health Regulations (IHR) 2005 di Indonesia. Retrieved from <https://kkptanjungpinang.com/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
- Nursalim, A., et al. (2022). Hubungan Pengetahuan dan Penerapan SOP dalam Pencegahan Wabah. *Jurnal Epidemiologi dan Kesehatan Lingkungan*, 5(3), 109–117.
- Pambudi, D., & Hartati, R. (2021). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penguatan SOP Pelabuhan. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 7(1), 44–53.
- Perawat.org. (2024). Tugas Perawat di Pelabuhan dan Bandara. Retrieved from <https://perawat.org/tugas-perawat-di-pelabuhan-dan-bandara/>
- Puskesmas Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). SOP Pelacakan Kontak Penyakit Potensi KLB. Retrieved from Scribd Document Database.

- Sitorus, M., et al. (2020). Kepatuhan Petugas dalam Penerapan SOP KKP di Wilayah Kerja Pelabuhan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 21–30.
- WHO. (2023). *International Health Regulations (IHR) – 3rd Edition*. Geneva: World Health Organization.